

BAB IV

POLITIK SEBAGAI UNGKAPAN CINTA KASIH KRISTIANI YANG LEBIH UNIVERSAL

4.1 Politik Sebagai Sakramen

Pada prinsipnya, politik sebagai sakramen berbicara tentang relasi antara iman kristiani dengan dunia. Artinya politik dapat menjadi tanda perwujudan iman bagi dunia. Melalui politik yang berlandaskan pada cinta kasih dapat di hadirkan secara nyata iman dan Allah yang menjelaskan peduli dan berbelaskasih.

Pelaksanaan politik sebagai sakramen dan keterlibatan agama dalam kehidupan masyarakat, dicoba dilihat dengan merujuk pada beberapa isu yang khas, baik dalam gereja universal mau pun dalam praksis gereja. Beberapa isu itu adalah hubungan agama negara, sikap gereja terhadap kaum buruh dalam industri, isu perempuan serta praksis dan keterlibatan teologi dalam menghadapi masalah-masalah.

Hubungan negara dengan agama yang dalam prakteknya berarti hubungan antara gereja dan suatu pemerintahan nasional, selalu mengandung ketegangan-ketegangan, yang dalam keadaan normal bisa dibuat laten. Keterlibatan lembaga agama dalam masalah kemanusiaan senantiasa berarti juga keterlibatan pengharapan. Kini yang ilahi sebagai dasar harapan, bukan sebagai penghibur bagi kekecewaan dan keputusaan.

Allah yang ikut serta dalam derita manusia mengingatkan kita akan masa depan kebebasan kita. Meski kita tidak dapat mengidentifikasi proses humanisasi dunia ini dengan kemajuan dan perkembangan kerajaan Allah, namun komunitas insani dan kerajaan Allah sangat berhubungan erat. Sebuah keterlibatan yang tidak membiarkan penderitaan dunia tenggelam dalam urusan rutin harian, melainkan sepenuhnya bertolak dari penderitaan.

Allah itu politis. Kandungan dan makna politis di sini adalah sikap Diri Allah yang berada di samping, mendampingi, dan menyertai. Mengingat Allah itu politis di hadapan kenyataan ciptaannya tidak ada pilihan lain. Manusia perlu bersikap politis. Tegasnya bersikap politis merupakan sakramen, yakni tanda dan sarana yang mengantar pada pembebasan dan penyelamatan.

4.2 Politik Sebagai Perwujudan Cinta Kasih

Sebagai warga negara yang hidup dalam suatu negara dan bangsa, kita wajib mempunyai rasa cinta terhadap apa yang ada di dalam negara termasuk cinta akan hal berpolitik. Keutamaan cinta kasih merupakan hal yang perlu diwujudkan dalam hidup bersama. Dalam hidup bersama sebagai masyarakat kita harus bekerja sama dengan negara dalam hal saling membangun. Dengan demikian akan muncul rasa persatuan dan berusaha untuk melaksanakan di mana saja kita berada.

Dalam konteks filosofis, cinta merupakan sifat baik yang dapat mewarisi semua kebaikan, perasaan belas kasih dan sayang. Selain itu cinta juga merupakan sebuah aksi atau kegiatan aktif yang dilakukan manusia terhadap objek lain,

berupa pengorbanan diri, empati, simpatik, perhatian, membantu, menuruti, menghormati, serta berusaha untuk menjaga objek yang dicintai tersebut.

Bertolak dari hal-hal di atas, dalam kegiatan berpolitik tentu juga membutuhkan hal-hal seperti yang dikatakan di atas. Politik membutuhkan perhatian, politik membutuhkan pengorbanan, politik membutuhkan bantuan, politik juga membutuhkan empati serta simpati dari rakyat maupun para politisi tersebut. Oleh sebab itu melalui lembaga politik kita mengorganisir hubungan kemasyarakatan, mengatur tata kehidupan dan pembagian kerja demi kesejahteraan semua orang, tidak seorang pun yang hidup diluar tali hubungan sosial¹.

Misalnya, para politisi memberikan bantuan kepada masyarakat kecil bukan karena semata-mata untuk dikenal atau untuk tujuan tertentu melainkan mereka membantu karena terdorong oleh rasa hidup sosial, rasa simpati yang kemudian berujung pada kesejahteraan banyak orang. Dengan demikian interaksi yang dibangun dapat mengembangkan kehidupan sosial. Maka politik sebagai perwujudan cinta kasih dapat mewujudkan harapan masyarakat dan merasa bebas dalam membentuk hidup bersama dari berbagai perbedaan dalam persekutuan dan kesatuan dari hidup sebagai satu dan sama.

4.3 Politik Dan *Bonum Commune*

Pada hakikatnya, manusia bersifat sosial dan harus dilihat dalam hubungannya dengan masyarakat, yang diperlukan oleh manusia untuk

¹ Leonardo Boff, *Allah Persekutuan Ajaran Tentang Allah Tritunggal*, dalam Aleksius Armanjaya (penerj), (Maumere: Ledalero, 2004) hlm.120

perkembangannya secara penuh. Hak-hak azasi manusia harus dilindungi agar setiap orang dapat ikut ambil bagian dalam hidup masyarakat. Hak-hak individual mempunyai tanggung jawab yang berkaitan dan harus dilaksanakan dengan pandangan untuk kesejahteraan umum.

Para negarawan dan politisi, baik di level nasional maupun lokal, ditugasi untuk mengusahakan kepentingan umum dan bukan kelompok atau diri sendiri. Negara pun bukan tujuan pada dirinya sendiri, melainkan diciptakan dan dihadirkan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Negara adalah untuk manusia, bukan manusia untuk negara. Maka para politisi kristiani diharapkan untuk selalu mendahulukan kepentingan umum atau kepentingan banyak orang dari pada kepentingan pribadi atau kepentingan individual dan juga kepentingan golongannya atau kepentingan partainya². Implikasi langsung dari prinsip ini adalah para politisi kristiani hendaknya berpolitik demi kesejahteraan masyarakat dan tidak memakai atau menggunakan kesempatan yang mungkin barangkali ada untuk secara sah dapat memperkaya diri.

Kesejahteraan bersifat universal dan oleh karena itu mencakup hak-hak maupun kewajiban-kewajiban, yang menyangkut seluruh umat manusia³. Kesejahteraan umum ialah keseluruhan kondisi hidup kemasyarakatan, yang memungkinkan baik kelompok-kelompok maupun anggota-anggota perorangan, untuk secara lebih penuh dan lebih lancar mencapai kesempurnaan mereka sendiri. Setiap kelompok harus memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan serta

² Frans Magnis Suseno <http://pk4as.blogspot.co.id/2011/03/Sekitar-Etika-Politik-Kristiani.html>. Di Akses Pada Tanggal 27 November. Pukul 19.00.

³ GS. no. 26

aspirasi-aspirasi kelompok-kelompok lain yang wajar, bahkan kesejahteraan umum segenap keluarga manusia⁴.

Dengan demikian para politisi mempunyai tugas untuk menata masyarakat melalui bidang politik serta menunjang kesejahteraan masyarakat. Melalui ranah politik para politisi menghidupi masyarakat sehingga kemudian dapat menata dunia secara umum dan negara secara khusus ke arah yang semakin berkembang yang didasarkan pada kebenaran, dibangun dalam keadilan, dihidupkan dengan cinta kasih, dan berusaha untuk membuat mereka menemukan keseimbangan yang semakin manusiawi dalam kebebasan, agar semuanya itu dapat terwujud dengan baik maka perlu ada pembaruan mentalitas dan perubahan-perubahan sosial secara besar-besaran.

4.4 Politik Dan Keadilan Sosial

Dalam sistem demokrasi, kedaulatan rakyat ada berada di tangan rakyat. Demokrasi sebagai sistem tidak hanya menyangkut hidup kenegaraan, melainkan juga hidup ekonomi, sosial dan kultural. Dengan demikian demokrasi dimengerti sebagai cara-cara pengorganisasian kehidupan bersama yang paling mencerminkan kehendak umum dengan tekanan pada peran serta perwakilan dan tanggung jawab.

Tujuan dari suatu negara adalah membangkitkan kesadaran akan situasi konkret dan strategi-strategi serta alternatif-alternatif untuk perubahan. Tepat di

⁴ Paus Yohanes XXIII, *Ensiklik Mater Et Magistra* Ibu Dan Guru Dalam Marcel Beding (penerj), (Ende: Arnoldus, 1967) art. 10. Selanjutnya digunakan singkatan MM dan No. Artikelnya.

sini politik hadir untuk membantu meringankan beban masyarakat yang lemah serta meringankan hidup masyarakat lemah. Allah menghendaki supaya bumi beserta segala isinya digunakan oleh semua orang dan sekalian bangsa sehingga harta benda yang tercipta dengan cara yang wajar harus mencapai semua orang yang berpedoman pada keadilan, diiringi dengan cinta kasih. Dengan demikian hak atas milik pribadi tidak digunakan untuk pribadi saja melainkan difungsikan untuk melayani kepentingan bersama. Dengan kata lain hak atas milik pribadi tidaklah mutlak⁵.

Keutamaan keadilan akan menjadi nyata bila diwujudkan dalam tindakan nyata kepada orang yang berhak atas perlakuan tersebut. Menghayati keadilan sebagai keutamaan moral bukanlah pekerjaan mudah. Setiap manusia mengharapkan keadilan, konsekuensinya, setiap orang pun dituntut berlaku adil terhadap sesamanya. Keadilan hendaknya dilihat sebagai struktur yang menjadi sifat cinta kasih. Cinta diaktualisasikan dalam keadilan.

Dalam buku Katekismus Gereja Katolik, ajaran tentang keadilan sosial ditempatkan dalam ajaran Gereja mengenai persekutuan manusia⁶. Dalam hubungan antara manusia, keadilan tidak dapat berada di luar tata susunan etika kasih. Keadilan komutatif menunjuk kewajaran dalam segala kesepakatan dan pertukaran antar dua individu atau antar kelompok sosial. Keadilan distributif menuntut agar penghasilan, kekayaan, dan kekuatan dalam masyarakat harus

⁵ Thomas P. Rausch, *Katolisisme Teologi Bagi Kaum Awam*, dalam Agus M. Hardjana (Yogyakarta: Kanisius, 2001) hlm. 249

⁶ Paus Yohanes Paulus II, (promulgator) *Katekismus Gereja Katolik*, dalam P. Herman Emburu SVD (penerj), (Ende: Nusa Indah, 1998), art. 450. Selanjutnya disingkat dengan KGK, no. artikelnya.

dinilai dengan memperhatikan akibat-akibatnya pada orang yang kebutuhan dasar materialnya belum terpenuhi. Keadilan legal berlaku bagi penduduk sebagai anggota masyarakat yang menurut hukum, wajib memberikan kepada masyarakat atau negara yang dibutuhkan , misalnya membayar pajak ⁷. Maka, Gereja menganjurkan agar politik mewujudkan keadilan sosial, yakni sebuah keadilan yang dibangun atas dasar cinta kasih dan solidaritas.

Semua orang mempunyai jiwa yang berbudi dan diciptakan menurut gambar Allah, dengan demikian mempunyai kodrat serta asal mula yang sama. Mereka semua ditebus oleh Kristus dan mengemban panggilan serta tujuan ilahi yang sama pula. Maka harus semakin diakuilah kesamaan dasariah antara semua orang⁸. Bertolak dari hal ini maka semua orang dapat diperlakukan dengan adil melalui ranah politik, karena semua yang dipanggil berdasarkan pada suatu pengakuan dasariah yang sama.

4.5 Politik Sebagai Pelayanan

Dalam dunia politik pasti ada pemimpin dan anggotanya dan sebaliknya dalam pelayanan terdapat pula yang mau dilayani dan yang melayani. Para pemimpin dan pelayan biasanya disebut dalam kerangka peran yang mereka mainkan seperti mengajar, memimpin, mengawasi dan menggembalakan. Antara pemimpin dan pelayan sangat berkaitan satu dengan yang lain yakni berkaitan dengan kepemimpinan dan cara menjalankan otoritas dalam sebuah kelompok.

⁷ A. Eddy Kristiayanto, *Spiritualitas Sosial Suatu Kajian Kontekstual*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010) hlm. 52

⁸ *GS. no.* 29

Dalam politik terdapat pemerintah dan pembesar-pembesar. pemerintah selalu berkaitan dengan tangan besi dan para pembesar selalu dikaitkan dengan kekuasaan. Pelayan pun demikian selalu berkaitan dengan masyarakat kecil, orang yang berkedudukan rendah. Dengan demikian pemerintah, pembesar dan pelayan itu ada dalam dunia politik dan dunia kehidupan kita manusia.

Para politisi kristiani diharapkan untuk menjadi pelayan yang bertanggung jawab. Dalam hal ini mereka dipercayakan oleh banyak orang untuk mengajarkan, membimbing masyarakat kecil menuju jalan yang baik atau menuju suatu kebahagiaan. Menjadi pelayan berarti siap berkorban dan berusaha untuk menempatkan diri pada posisi yang lemah, miskin dan tak berdaya. Bertolak dari kalimat di atas mau mengatakan bahwa lembaga lebih tinggi wajib membantu lembaga lebih rendah dan tepat di sini politik sebagai pelayan yakni seorang politisi layak nya menjadi seorang pelayan yang siap membantu orang-orang yang membutuhkan⁹. Sebagai sarana pelayanan politik berarti tindakan bersama yang terarah pada kebutuhan. Sebuah cara bertindak yang khas dalam suatu relasi yang dibangun antara sesama, baik yang terjepit oleh kesulitan material maupun psikis. Tindakan ini membutuhkan pendekatan personal dari para politisi dalam rangka mengatasi situasi tertekan.

Politik berbingkai pelayanan juga dapat membangun sebuah usaha bersama dalam masyarakat untuk memperbaiki infrastruktur sosial. Hakikat

⁹ Ign. Suharyo, *The Catholic Way: Kekatolikan dan Keindonesiaan Kita*, *Op. Cit.*, hlm. 61-68. Di akses pada tanggal 27 november. Pukul 19.00

pelayanan adalah cinta terhadap sesama, perwujudan persekutuan dengan Allah¹⁰. Pelayanan terarah pada orang lain untuk memberikan dukungan, keberanian, harapan-harapan hidup dalam situasi sulit. Dalam perspektif iman yang membebaskan, para saksi iman menyuarakan pembebasan manusia dari deskriminasi dan dari sikap harus diam.

Pewartaan para politisi kristiani harus berorientasi pada pembebasan dari kekuasaan, pada usaha memampikan masyarakat untuk menghadapi hidup secara bertanggung jawab, maka melalui politik dapat memungkinkan orang belajar mengungkapkan diri dan pengalamannya secara otonom serta mendapat peluang untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan bersama.

4.6 Politik Dan Keberpihakan Pada Kaum Miskin

Setiap pemerintahan sipil mempunyai kewajiban untuk mempromosikan kesejahteraan umum dalam semua bidang tanpa mementingkan beberapa individu atau kelompok tertentu. Meskipun demikian, pertimbangan terhadap keadilan dan kesamaan dapat menuntut siapa saja yang ada dalam kekuasaan untuk memberikan perhatian kepada anggota masyarakat yang lemah karena dalam situasi terpojok mereka tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan hak-hak mereka dan menuntut hak-hak mereka yang sah¹¹.

Di dalam pernyataan di atas, terkandung suatu kebenaran yang jelas tentang argumen terhadap gagasan keberpihakan terhadap kaum miskin yang

¹⁰ Budi Susanto, *Teologi Dan Praksis Post Modern*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010) hlm.118

¹¹PT. Art 56

memiliki tempat sentral dalam Ajaran Sosial Gereja. Hubungan antara otoritas kekuasaan dan warga negara dapat dilihat dalam kerangka hak dan kewajiban. Ciri suatu pemerintahan yang baik adalah adanya suatu hukum tentang hak-hak dan konstitusi tertulis yang mempertimbangkan konteks dan keterbatasan-keterbatasannya dalam lingkup aktivitasnya.

Rumusan argumennya jelas, yakni apa yang telah dikatakan dalam level individu dapat diterapkan dalam hubungan antar komunikasi politik, yang mana kesejahteraan umum dari negara harus dilihat dalam konteks yang lebih luas dari kesejahteraan umum manusia¹².

Paus Yohanes XXIII menaruh perhatian secara khusus terhadap situasi buruk seiring dengan bertambahnya jumlah pengungsi yang menderita. Para pengungsi tidak dengan sendirinya kehilangan haknya karena pencabutan kewarganegaraannya dari negara asal mereka. Hak-hak ini termasuk hak untuk masuk ke dalam suatu negara di mana mereka berharap dapat hidup secara lebih baik¹³.

Itulah sebabnya, negara memiliki kewajiban untuk menerima pengungsi dari negara lain dan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, memampukan mereka menjadi anggota masyarakat yang telah mereka pilih. Dengan demikian, anjuran Paus Yohanes XXIII ini menunjukkan kepada kita tentang suatu ajaran baru yang berbeda dari ajaran-ajaran sebelumnya. Oleh sebab

¹² *Ibid.*

¹³ PT. Art. 106

itu manusia wajib menjaga keutuhan lingkungan hidup agar generasi-generasi mendatang menemukan bumi yang masih pantas dihuni.

Selanjutnya ketika berbicara mengenai otoritas publik, tidaklah mungkin kita mengabaikan urusan keberpihakan kepada kaum lemah. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa fokus utama keprihatinan Gereja sebagai mana tampak dalam keterlibatan sosial Gereja adalah permasalahan sosial umat manusia, dengan sikap yang tegas memihak kaum miskin dan lemah.

Namun demikian Paus Yohanes XXIII melalui ensiklik *Mater Et Magistra* memperluas pengertian kaum lemah ini selaras dengan perluasan tema permasalahan sosial umat manusia itu sendiri. Kaum lemah adalah kaum petani yang harus berurbanisasi dan pertanian itu sendiri¹⁴, serta bangsa-bangsa miskin dan berkekurangan¹⁵.

Maka, melalui ajaran cinta kasih, ditanamkan sikap hormat terutama terhadap kaum miskin dan menderita, perhatian atas situasi khusus mereka dalam masyarakat. Ini berarti bahwa mereka yang lebih beruntung harus merelakan secara tulus sejumlah hak mereka demi pelayanan mereka bagi sesama. Jangan sampai sikap kepedulian terhadap sesama itu sekedar untuk memenuhi ketentuan hukum saja, apa lagi jika kesetaraan di hadapan hukum itu justru dapat menjadi dalih untuk menerapkan tindakan yang diskriminatif, eksploitasi yang berkelanjutan serta pelecehan terhadap sesama. Selain itu, perlu ditanggalkan

¹⁴ MM. Art. 124-126

¹⁵ MM. Art. 158

mentalitas yang menganggap bahwa kaum miskin itu merupakan beban yang mengganggu tatanan kehidupan sosial.

Berdasarkan uraian di atas tampak jelas bahwa Gereja memberi perhatian khusus dan serius terhadap kaum yang miskin dan lemah. Dengan demikian jika dihubungkan dengan keadilan sosial dan otoritas publik, maka semua kegiatan politik yang dilakukan oleh orang-orang kristen sebagai warga gereja perlu juga mempertimbangkan dan memperhatikan kaum miskin dan lemah. Para politisi di anjurkan oleh Gereja sendiri agar dalam setiap tugas dan pelayananNya teristimewa dalam membuat kebijakan-kebijakan publik harus senantiasa mengutamakan kaum miskin dan lemah.

Politik sebagai suatu ekspresi cinta kasih yang universal juga berarti senantiasa berpihak pada yang miskin dan lemah, sebagaimana yang dinyatakan bahwa tindakan demi keadilan serta keterlibatan dalam perubahan dunia sepenuhnya tampak bagi Gereja sebagai dimensi konstitutif pewartaan kabar gembira itu sendiri; atau dengan kata lain merupakan pengutusan gereja demi penebusan umat manusia dan pembebasannya dari setiap situasi yang menindas. Para politisi Kristiani adalah mereka yang menjalani tugas perutusan Gereja demi penebusan umat manusia dari setiap situasi yang menindas melalui kebijakan-kebijakan publik yang adil dan merata.

4.7 Politik Sebagai Sarana Perwujudan Kerajaan Allah

Kekuasaan sebagai pelayanan yang rendah hati dalam hal ini berperan sebagai seorang hamba yang merupakan tipe pelayan kerajaan Allah; itu juga

berarti sebagai tipe pelayanan gereja yang seharusnya dapat direalisasikan melalui kehidupan konkrit. Maka politik hendaknya berorientasi pada kesejahteraan bersama, partisipasi politik, perwujudan iman, dan pengungkapan cinta kasih kristiani. Dengan demikian melalui tugas dan pelayanannya, Gereja menghadirkan dan merealisasikan Kerajaan Allah di tengah dunia.

Aspek politik Kerajaan Allah nampak dalam pewartaan Yesus pada bagaian awal pelayanan Yesus nampaknya ditekankan aspek nasional dan politis dari kerajaan Allah untuk Orang Yahudi. Kerajaan Allah hadir dengan cara-cara tertentu di dalam diri dan pelayanan Kristus¹⁶. Di kalangan Orang Yahudi dimensi sosial politik tidak terpisahkan dari dimensi religius maka hampir tidaklah mungkin memisahkan pewartaan Yesus tentang keselamatan dari setiap dimensi sosial-politik-Nya¹⁷.

Politik hadir serbagai ranah yang membantu untuk menyelamatkan masyarakat dari bentuk penindasan. Keselamatan yang dilakukan oleh para politisi melalui ranah politik membawa suatu kebaikan bersama yakni perdamaian, persaudaraan dan kesejahteraan. Tugas seorang penguasa atau raja adalah untuk menyelamatkan rakyatnya dari musuh-musuh, dari struktur hidup yang jahat, dari kemiskinan, sakit dan penindasan.

Politik sebagai perwujudan kerajaan Allah yakni politik dapat berperan sebagai Allah yang membebaskan dalam arti pembebasan dari penindasan,

¹⁶ John Fuellenbach, *Kerajaan Allah Pesan Inti Ajaran Yesus Bagi Dunia Modern*, dalam Eduard Jebarus (penerj) (Ende: Nusa Indah, 2006), hlm.171.

¹⁷ *Ibid.*

pembebasan dari perbudakan terhadap masyarakat kecil. Dengan berperan sebagai Allah yang membebaskan maka para politisi dapat menjadikan politik sebagai jalan yang dapat menyelamatkan sesama yang dalam situasi terjepit oleh karena kekurangan-kekurangan yang dihadapi. Dapat dikatakan bahwa keprihatinan Allah yang utama adalah soal keadilan. Maka politik harus berusaha untuk mengutamakan keadilan dalam hal untuk memulihkan martabat orang-orang yang malang. Dalam berpolitik perlu menanamkan cinta dan belas kasih terutama kepada masyarakat yang menderita dan tertindas.

Melalui politik dapat terwujudnya kerajaan Allah kepada masyarakat, yang dapat mentransformasi semua struktur pemerintahan mau-pun masyarakat demi keadilan dan hak-hak kaum miskin. Maka pemulihan keadilan dan pembebasan bagi kaum tertindas merupakan misi politik yang utama, seperti misi utama Yesus yaitu memulihkan keadilan dan membawa pembebasan bagi bangsa yang tertindas.

Selain kesejahteraan yang bersifat fisik lahiriah dalam wujud hukum yang ada dan pembangunan yang merata, politik juga berperan sebagai ungkapan cinta kasih yang universal yang membebaskan orang atau masyarakat dari mental-mental hidup yang membawa mereka pada kehancuran moralitas dan tercemarnya nilai-nilai kemanusiaan. Tidak dapat diingkari bahwa zaman ini di tengah segala kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemerosotan nilai-nilai kemanusiaan pun kian bertambah. Segala perkembangan dunia teristimewa dalam bidang komunikasi dan informasi, di satu sisi mempererat hubungan manusia namun serentak pula melahirkan mental hedonis, pragmatis dan egoistik dalam diri

manusia. Realitas seperti ini menyebabkan manusia seolah-olah teralienasi satu terhadap yang lain. Sesama tidak lagi dilihat sebagai saudara yang harus dirangkul dan dikasihi melainkan sebagai pesaing yang harus ditaklukkan.

Dalam hubungan dengan kedudukan manusia sebagai anggota masyarakat, mental egoisme, hedonisme dan pragmatisme ini kemudian membawa akibat pada sikap masa bodoh pribadi-pribadi terhadap kegiatan-kegiatan umum dan sosial kemasyarakatan. Dalam situasi seperti ini peran politik dalam suatu hubungan yang tidak terpisahkan dengan negara harus selalu berusaha untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak hanya menciptakan kesejahteraan secara fisik melainkan juga membawa dampak pada pembentukan mentalitas dan karakter setiap pribadi sebagai warga masyarakat. Politik sebagai satu tindakan cinta kasih berperan untuk merangkul, membebaskan, mencintai, mencari dan menemukan kembali warga masyarakatnya yang telah “hilang” bukan hanya secara fisik tetapi juga karena terbelenggu oleh sikap hidup dan mentalitas yang keliru.

4.8 Politik Sebagai Sarana Perwujudan Cinta Kasih Lebih Luas (Universal)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Universal adalah umum yang berarti berlaku untuk semua orang atau seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia¹⁸. Universal berarti suatu konsep umum yang dapat diterapkan pada sisi mana pun. Misalnya konsep manusia merupakan konsep universal.

Selain karena dapat dijalankan atau dihayati oleh siapa saja, keuniversalan politik juga terletak pada tujuan dan hakekat dasar dari politik itu sendiri. Sebagai

¹⁸ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 1054.

mana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tujuan politik itu sendiri adalah mencapai kesejahteraan bersama dan keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat. Politik bukanlah suatu sarana demi kepuasan pribadi, golongan atau alat untuk melegitimasi kekuasaan melainkan sebagai wadah yang membawa warga masyarakat secara umum pada suatu kebaikan bersama (*bonum commune*). Dengan demikian, politik tampil sebagai suatu tindakan universal karena berhubungan langsung dengan kebaikan umum. Maka dapat dipahami bahwa, tugas politik berbeda dengan suatu tindakan karitatif. Jika tindakan karitatif memberikan bantuan kepada seseorang atau masyarakat tertentu barang yang menjadi kebutuhan mereka, guna memenuhi kebutuhan yang bersifat sementara. Sedangkan tindakan politik dalam sifatnya yang universal bertugas merumuskan kebijakan-kebijakan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Singkatnya tindakan karitatif itu ruang lingkupnya terbatas, sedangkan tindakan politik memiliki ruang lingkup yang lebih luas.

Keuniversalan cinta kasih politik juga berakar pada hakekat politik yang bersifat universal. Politik selalu berhubungan dengan banyak orang, sebab suatu tindakan politik selalu merupakan hasil dari kreasi akal manusia sebagai makhluk yang berdimensi sosial. Politik tercipta dari dorongan kepentingan sosialitas manusia dalam keberadaannya di tengah yang lain. Tanpa yang lain atau masyarakat seorang pribadi tidak dapat berpolitik. Oleh karena itu politik selalu berkaitan dengan banyak orang dan selalu bersifat universal. Politik dapat dilakoni atau diperankan oleh siapa saja, apabila semua persyaratan dan kriteria untuk berpolitik dapat dipenuhi dan bisa dijalankan dengan baik.

Selanjutnya cinta kasih yang universal berarti berbicara tentang manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia; maka mengasihi bagi Orang Kristiani bukanlah suatu pilihan, melainkan rahmat yang kemudian menjadi suatu perintah: “Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu” (Yoh 15:12) cinta kepada Tuhan dan sesama itu sekaligus perintah nomor satu dan iman bagi setiap pengikut Kristus. Salah satu ciri utama Cinta Kristiani adalah Cinta kepada Allah dan cinta sesama. Cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama merupakan cinta yang universal yang bergerak dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam bidang politik.

Dalam terang pewartaan Paulus Cinta Kasih Allah dapat dikategorikan sebagai *kasih Allah dan kasih Kristus kepada manusia*: “Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku” (Gal 2:20). Paulus dalam pewartaannya selalu menegaskan agar manusia mengasihi Allah; “Jikalau seorang berkata: Aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah, yang dilihatnya”(bdk. 1Yoh 4:20). Lebih lanjut Paulus menekankan orang yang harus diwujudkan dengan mengasihi Allah akan dikenal oleh Allah. Maka bagi Paulus, mengasihi Allah berarti juga mengasihi sesama. “Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih”(Rm 14:15). Dengan demikian perbuatan kasih yang dilukiskan oleh Paulus adalah bagaimana seseorang hidup berdampingan

hendaknya harus saling membantu, yang kaya membantu mereka yang berkekurangan.

Cinta kasih tidak pernah mencari keuntungan diri sendiri melainkan bersikap murah hati yang terungkap dalam tindakan saling menolong, terbuka, merasakan apa yang dirasakan orang lain, serta berlaku ramah terhadap yang lain. Maka sikap murah hati akan menjadikan seseorang selalu bersedia berkorban dengan tulus untuk meringankan beban penderitaan sesamanya atau untuk membahagiakan sesamanya¹⁹.

Maka, Cinta kasih yang diungkapkan dalam bidang politik itu tampak melalui tindakan dan komitmen untuk memperjuangkan kebaikan bersama, kebaikan universal. Sebagaimana yang tertulis dalam dokumen *Gaudium Et Spes* “untuk membangun kehidupan politik yang sungguh manusiawi, tidak ada yang lebih baik daripada menumbuhkan semangat batin keadilan dan kebaikan hati serta pengabdian demi kesejahteraan umum²⁰”.

Dalam membangun kehidupan politik yang sungguh manusiawi, seorang politisi mampu menerapkan nilai-nilai cinta itu dalam pelayanannya kepada masyarakat, Maka melalui bidangnya seorang politisi mampu menciptakan objek yang berguna untuk dunia agar pantas bagi habitat manusia²¹.

¹⁹ Antonius Atosokhi Gea, *Relasi Dengan Tuhan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), hlm. 212.

²⁰ **GS.** no. 73.

²¹ Haryatmoko, *Etika Politik Dan Kekuasaan*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2014) hlm.174

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa politik dapat dipahami sebagai “sakramen” cinta kasih. Dalam dan melalui politik yang berjiwakan cinta kasih, memungkinkan terciptanya kesejahteraan, kebaikan bersama dan keadilan bagi semua orang. Politik yang bernafaskan cinta kasih merupakan sarana atau saluran yang lebih efektif sehingga terwujudnya cinta kasih dan Kerajaan Allah di tengah dunia. Cinta kasih politik menunjang terciptanya kebijakan-kebijakan politik yang sesuai dengan prinsip iman kristiani yakni terwujudnya bonum commune dan keberpihakan dan solidaritas terhadap mereka yang miskin, berkekurangan dan terpinggirkan. Itulah sebabnya, politik dipahami sebagai perwujudan iman melalui politik, cinta kasih bisa menembus batas-batas dan sekat SARA. Politik memungkinkan nilai cinta kasih terealisasi secara lebih luas, dapat dinikmati dan dirasakan oleh banyak orang.